



Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung E-Government: Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

Dwi Rahmayanti¹; Tatik Mulyati²; Ahadiati Rohmatiah³

¹Universitas Merdeka Madiun

dwijayanew08@gmail.com

²Universitas Merdeka Madiun

tatikmulyati@unmer-madiun.ac.id

³Universitas Merdeka Madiun

ahadiati@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Kajian ini dirancang untuk menelaah sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berperan dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan digital di lingkungan Diskominfo Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif bercorak studi kasus, di mana penggalan data dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur secara mendalam, pengamatan langsung, serta penelaahan dokumen dari lima narasumber yang ditentukan melalui teknik sampling secara purposif. Proses analisis data mengadopsi prosedur yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang dipadukan dengan kerangka konseptual SCV mencakup *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Temuan penelitian menunjukkan penyelenggaraan SIMPEG secara keseluruhan telah memperlihatkan perkembangan positif, dan ditopang oleh tiga elemen utama: keberpihakan kebijakan, komitmen kepemimpinan, dan kerangka regulasi yang memadai pada aspek *support*; kesiapan SDM serta infrastruktur yang cukup layak pada aspek *capacity*; dan capaian manfaat konkret berupa percepatan layanan administratif, konsolidasi data ASN, serta penguatan pengambilan keputusan berbasis data pada aspek *value*. Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi digital SDM, kebutuhan penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta koordinasi kelembagaan lintas perangkat daerah yang belum optimal. Studi ini memperkuat argumen bahwa efektivitas suatu sistem informasi kepegawaian tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologinya, melainkan ditentukan oleh sinergi antara dukungan kelembagaan, kematangan kapasitas sumber daya, dan relevansi manfaat yang dirasakan oleh penggunanya.

Kata Kunci: SIMPEG, *e-Government*, SPBE, *Support-Capacity-Value*, Administrasi Kepegawaian Digital

Abstract

This research is conducted to examine how the Personnel Management Information System (SIMPEG) operates in accelerating digital governance at the Communications and Information Office (Diskominfo) of Madiun Regency. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected

through in-depth interviews, observation, and document analysis involving five purposively selected informants. Data analysis followed Miles, Huberman, and Saldana's (2014) model within the Support, Capacity, and Value (SCV) framework. The findings indicate that SIMPEG implementation is progressing adequately, underpinned by strategic policies, leadership commitment, and internal regulations (support); sufficient human resource readiness and infrastructure (capacity); and tangible benefits including improved administrative efficiency, integrated civil servant data, and data-driven decision-making support (value). SIMPEG is moving toward functioning as a strategic instrument underpinning electronic-based government (SPBE), beyond its initial role as a purely administrative tool. Key barriers include limited digital competency among human resources, the need for infrastructure strengthening, and suboptimal inter-institutional coordination across regional government units. This study affirms that the success of SIMPEG implementation is determined not solely by technology, but by the alignment of organizational support, resource capacity, and generated value.

Keywords: *SIMPEG, e-Government, SPBE, Support-Capacity-Value, Digital Personnel Administration*

1 Pendahuluan

Di tengah gelombang reformasi industri 4.0, modernisasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi telah menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ketentuan tersebut mengharuskan setiap lembaga pemerintahan untuk menyatukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh rangkaian proses administrasi dan pelayanan publik yang dijalkannya. Di tengah kerangka kebijakan tersebut, SIMPEG tampil sebagai salah satu komponen kunci yang menopang berjalannya ekosistem SPBE secara fungsional dan berkelanjutan, yakni sebuah platform berbasis teknologi yang difungsikan untuk mengelola data seluruh aparatur sipil negara (ASN) secara akuntabel, terintegrasi, dan terdigitalisasi.

Sebagai salah satu perangkat di Kabupaten Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran sentral dalam pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, statistik, serta persandian di wilayahnya. Kedudukan Diskominfo sebagai pusat kendali sistem digital daerah menjadikannya ujung tombak dalam implementasi *e-Government*, termasuk dalam hal penerapan SIMPEG sebagai bagian dari sistem manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik. Implementasi SIMPEG di instansi ini dipandang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, mengingat kompleksitas dimensi yang melingkupinya, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur TIK, konsistensi dukungan kebijakan, hingga tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip SPBE.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG di berbagai instansi pemerintah memberikan manfaat signifikan terhadap efektivitas layanan kepegawaian. Muin et al. (2024) menemukan bahwa SIMPEG berkontribusi positif terhadap dukungan *e-Government* di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara Sariasih dan Wijaya (2025) menegaskan peran SIMPEG dalam meningkatkan kinerja administrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Namun, penelitian Normajatun et al. (2022) menemukan bahwa kelemahan pada aspek SDM dan infrastruktur dapat menghambat efektivitas sistem. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SIMPEG bersifat kontekstual dan multidimensional.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah celah penelitian yang belum terjawab oleh studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian terdahulu umumnya hanya menganalisis satu dimensi keberhasilan (seperti efektivitas teknis atau kepuasan pengguna) tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka analisis yang holistik. Kedua, belum ada studi yang secara khusus mengkaji implementasi SIMPEG pada instansi yang sekaligus berperan sebagai pengelola ekosistem digital daerah, sebagaimana fungsi Diskominfo. Konteks ini unik karena Diskominfo Kabupaten Madiun tidak hanya sebagai pengguna SIMPEG, tetapi juga sebagai pemangku kebijakan TIK daerah, sehingga dinamika implementasinya berbeda dengan instansi teknis lainnya. Ketiga, penggunaan kerangka SCV (*Support, Capacity, Value*) untuk menganalisis SIMPEG dalam konteks SPBE masih sangat terbatas dalam literatur Indonesia. Kontribusi akademik artikel ini terletak pada penerapan kerangka SCV secara terpadu untuk mengevaluasi SIMPEG di lingkungan instansi strategis daerah, sekaligus menawarkan kerangka analisis berbasis SCV yang dapat menjadi rujukan awal bagi kajian implementasi *e-Government* pada konteks serupa.

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, studi ini memiliki tiga sasaran utama: pertama, menelaah bagaimana SIMPEG diimplementasikan di Diskominfo Kabupaten Madiun ditinjau dari tiga dimensi yakni *support, capacity, dan value*; kedua, menguraikan peran nyata SIMPEG dalam mendorong terwujudnya *e-Government* di instansi tersebut; dan ketiga, memetakan hambatan yang dihadapi sekaligus merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Support, Capacity, dan Value* (SCV) sebagai pisau analisis utama, yang berpijak pada konsep penciptaan nilai publik (*public value*) yang dirumuskan Moore (1995) dan selanjutnya dikembangkan sebagai kerangka evaluasi layanan publik digital oleh Harvard Kennedy School of Government. Pemilihan SCV didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, SCV dirancang khusus untuk mengevaluasi implementasi layanan digital di sektor publik, sehingga lebih relevan dibandingkan model umum seperti TAM (Technology Acceptance Model) yang lebih berfokus pada penerimaan teknologi individu, atau DeLone & McLean yang mengukur kesuksesan sistem dari perspektif teknis. Kedua, ketiga dimensi SCV, dukungan organisasi, kapasitas sumber daya, dan nilai manfaat secara langsung merepresentasikan kompleksitas implementasi SIMPEG yang melibatkan aspek kebijakan, SDM, infrastruktur, dan manfaat layanan secara bersamaan. Ketiga, penelitian terkait *e-Government* di Indonesia telah menunjukkan relevansi kerangka SCV dalam konteks pemerintahan daerah (Nurhidayah et al., 2025). Dalam penelitian ini, dimensi *Support* digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, komitmen pimpinan, dan anggaran; dimensi *Capacity* untuk menilai kesiapan SDM dan infrastruktur TIK; serta dimensi *Value* untuk mengukur manfaat konkret yang dirasakan oleh organisasi dan pengguna sistem.

2 Kajian Pustaka

Transformasi digital pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari fondasi pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan landasan dalam membangun organisasi yang efektif dan berkelanjutan (Ariadi et al., 2025), dan Putra et al. (2024) menegaskan bahwa SDM menempati posisi sentral sebagai penentu utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan kelebagaannya. Malik et al. (2023) membuktikan bahwa pengelolaan SDM berbasis teknologi secara konsisten meningkatkan kinerja dan keterlibatan pegawai, sebuah temuan yang menjadikan sistem informasi kepegawaian bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan instrumen strategis MSDM itu sendiri.

Instrumen strategis tersebut dalam konteks pemerintahan terwujud dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Laudon dan Laudon (2021) menjelaskan bahwa SIMPEG merupakan sistem berbasis komputasi yang dibangun khusus untuk mengelola

keseluruhan siklus data kepegawaian mulai dari penghimpunan, pemrosesan, hingga penyajian informasi secara terpadu guna memperkuat landasan pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Maulana et al. (2025) mengungkapkan bahwa SIMPEG berbasis web berperan sebagai repositori terpusat data ASN yang mampu menopang berbagai proses kepegawaian secara lebih cepat dan akurat. Untuk mengukur efektivitasnya, Wicaksono et al. (2025) menerapkan kerangka evaluatif DeLone dan McLean dengan tiga indikator utama: mutu teknis sistem, tingkat kepuasan pengguna, dan dampak positif nyata bagi organisasi. Dengan demikian, SIMPEG tidak berdiri sendiri sebagai sistem teknis, melainkan merupakan komponen operasional yang menentukan kualitas tata kelola ASN secara keseluruhan.

Pada level yang lebih luas, penerapan SIMPEG merupakan bagian tidak terpisahkan dari agenda *e-Government* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Huda et al. (2022) merumuskan *e-Government* sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam rangka memperluas aksesibilitas, meningkatkan mutu layanan publik, sekaligus memperkokoh keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui Perpres No. 95 Tahun 2018, pemerintah Indonesia menegaskan SPBE sebagai model penyelenggaraan administrasi negara yang mengintegrasikan TIK secara menyeluruh demi terwujudnya birokrasi yang lebih produktif, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kannapadang et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa optimalisasi *e-Government* di tingkat daerah berdampak nyata pada transparansi dan akuntabilitas, apabila didukung oleh desain layanan yang usable, interoperabilitas data, dan kapasitas organisasi yang memadai. Artinya, keberhasilan SIMPEG sebagai instrumen *e-Government* tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologinya, tetapi oleh kesiapan ekosistem organisasi secara keseluruhan.

Untuk membaca kesiapan ekosistem tersebut secara analitis, penelitian ini menggunakan kerangka *Support, Capacity, dan Value* (SCV) yang dirumuskan oleh Moore (1995) dan dikembangkan Harvard Kennedy School of Government. Kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem di sektor publik ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam membangun dukungan kelembagaan (*support*), menggerakkan kapasitas sumber daya yang dimiliki (*capacity*), dan menghasilkan nilai publik yang nyata dan terukur bagi pengguna maupun organisasi (*value*). SCV dipilih dalam penelitian ini karena dirancang khusus untuk mengevaluasi implementasi layanan digital di sektor publik, berbeda dari model TAM yang berfokus pada penerimaan teknologi individual, atau DeLone dan McLean yang lebih berorientasi pada kualitas teknis sistem (Nurhidayah et al., 2025).

Namun, kerangka SCV perlu dilengkapi dengan perspektif implementasi kebijakan untuk memahami mengapa kualitas dukungan dan kapasitas bisa berbeda hasilnya di antara instansi yang menjalankan regulasi yang sama. Teori implementasi kebijakan Edwards III yang dikutip Astuti et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas implementasi ditentukan oleh empat faktor: kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang kondusif. Dalam konteks SIMPEG, keempat faktor ini secara langsung bersinggungan dengan dimensi SCV: komunikasi kebijakan dan disposisi aparatur memengaruhi dimensi *support*; ketersediaan sumber daya berkaitan erat dengan dimensi *capacity*; sedangkan struktur birokrasi yang kondusif menjadi prasyarat terwujudnya dimensi *value* yang optimal. Dengan demikian, SCV menjadi tulang punggung analisis dalam penelitian ini, sementara teori Edwards III berfungsi sebagai lensa komplementer yang menjelaskan akar hambatan yang ditemukan di lapangan sehingga kajian tidak hanya berhenti pada pertanyaan *apa* yang terjadi dalam implementasi SIMPEG, tetapi juga *mengapa* kondisi tersebut terjadi.

3 Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan rancangan studi kasus tunggal. Pertimbangan penggunaan model ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana SIMPEG dijalankan dalam konteks nyata, mengurai kendala-kendala yang muncul dalam praktiknya, serta menelaah kontribusinya terhadap kemajuan *e-Government* di Diskominfo Kabupaten Madiun. Lokasi penelitian ditetapkan di Diskominfo Kabupaten Madiun dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki posisi sentral sebagai pengelola ekosistem digital daerah sekaligus pelaksana utama kebijakan *e-Government* dan SPBE di tingkat kabupaten.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) semiterstruktur kepada lima informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria: memiliki peran langsung dalam implementasi atau pengawasan SIMPEG, memiliki pengetahuan tentang kebijakan TIK daerah, dan bersedia memberikan informasi secara mendalam. Informan meliputi Kepala Dinas (I1), Sekretaris Dinas (I2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (I3), Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (I4), dan Staf Sandiman (I5). Wawancara dilaksanakan pada bulan Januari–Februari 2026 dengan durasi rata-rata 30–40 menit per sesi. Kecukupan data dijamin melalui prinsip *data saturation*, yaitu penghentian pengumpulan data ketika informasi baru tidak lagi menghasilkan tema atau kategori baru yang signifikan sebagaimana kondisi ini dicapai setelah wawancara dengan informan kelima (I5) tidak menghadirkan perspektif baru yang berbeda secara substansial dari informan sebelumnya, dan dikonfirmasi melalui *member checking* kepada informan kunci (I1 dan I3); (2) observasi non-partisipan terhadap proses kerja penggunaan SIMPEG di lingkungan Diskominfo; serta (3) studi dokumentasi berupa SOP Kepegawaian, laporan SPBE, regulasi terkait, dan dokumentasi visual berupa tangkapan layar antarmuka sistem SIMPEG serta dokumentasi alur kerja penggunaan sistem (tanpa menampilkan data kepegawaian yang bersifat rahasia). Untuk memastikan validitas data, digunakan triangulasi metode, sumber, dan teori, serta *member checking* kepada informan kunci. Seluruh proses wawancara dilaksanakan dengan memperhatikan aspek etika penelitian: informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian dan hak untuk menolak berpartisipasi, kerahasiaan identitas dijaga melalui penggunaan kode informan (I1–I5) dalam penyajian data, serta persetujuan lisan diperoleh sebelum wawancara dimulai. *Member checking* dilakukan dengan mengirimkan ringkasan temuan kepada informan kunci (I1 dan I3) untuk dikonfirmasi keakuratannya sebelum finalisasi analisis.

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tahapan: (1) transkripsi dan pengorganisasian data; (2) reduksi data; (3) pengodean (*coding*) yang dilakukan secara deduktif-induktif: kode-kode awal (*open coding*) dihasilkan langsung dari data lapangan, kemudian dikategorikan (*axial coding*) ke dalam dimensi-dimensi SCV sebagai kerangka deduktif, dan akhirnya diintegrasikan (*selective coding*) ke dalam tema-tema inti yang menjawab pertanyaan penelitian; (4) penyajian data dalam bentuk matriks informan dan matriks *coding* per dimensi SCV; serta (5) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sebagai contoh, kutipan I3 tentang kemampuan operasional SDM dikode secara terbuka sebagai "kompetensi pengguna", lalu diklasifikasikan ke dalam dimensi *Capacity*, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam tema "kesiapan SDM yang operasional namun belum analitik". Keabsahan data dijaga melalui pemenuhan empat kriteria *trustworthiness*: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Nowell et al., 2017). Untuk memastikan kerangka SCV dapat diterapkan secara analitis dan tidak sekadar deskriptif, berikut disajikan tabel operasionalisasi dimensi SCV yang menjadi pedoman pengumpulan dan analisis data penelitian ini.

Tabel 1: Operasionalisasi Kerangka SCV dalam Analisis Implementasi SIMPEG

Dimensi	Indikator	Sumber Data	Arah Pertanyaan dan Observasi	Bentuk Bukti
Support	1) Dukungan Pimpinan	Wawancara, Observasi,	Apakah ada regulasi formal yang	Peraturan Bupati, SOP, Pernyataan informan, notulen rapat, Dokumen perencanaan anggaran
	2) Ketersediaan Regulasi/SOP	Dokumen	melandasi SIMPEG? Bagaimana pimpinan mengomunikasikan arah pengembangan	
	3) Dukungan Anggaran		SIMPEG? Apakah anggaran dialokasikan secara eksplisit?	
	4) Komitmen Digitalisasi			
Capacity	1) Kompetensi SDM SIMPEG	Wawancara, Observasi,	Apakah operator mampu menjalankan fungsi dasar dan analitik? Bagaimana kondisi server, jaringan, dan perangkat keras? Apakah SIMPEG terintegrasi dengan sistem lain?	Pernyataan informan, rekam pelatihan, Laporan teknis, hasil observasi, Laporan SPBE
	2) Infrastruktur TIK	Dokumen		
	3) Ketersediaan Jaringan & Perangkat			
	4) Kapasitas Teknis Operasional Sistem			
Value	1) Kemudahan Akses Data Kepegawaian	Wawancara, Observasi, Dokumen	Seberapa jauh SIMPEG mempercepat proses dibanding sebelumnya? Apakah data lebih konsisten dan minim duplikasi? Apakah SIMPEG aktif digunakan sebagai basis kebijakan?	Pernyataan informan, Laporan teknis, hasil observasi, Laporan SPBE
	2) Efisiensi Administrasi Kepegawaian			
	3) Kecepatan Layanan Kepegawaian			

Sumber: Data Primer, diolah (2026).

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil Implementasi SIMPEG di Diskominfo Kabupaten Madiun

SIMPEG yang diimplementasikan di Diskominfo Kabupaten Madiun merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola data seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Sistem ini mencakup fitur-fitur utama meliputi: (a) pengelolaan biodata dan riwayat kepegawaian ASN; (b) pencatatan riwayat jabatan, pendidikan, dan pelatihan; (c) pengelolaan dokumen kepegawaian digital; (d) pemrosesan mutasi, promosi, dan pensiun; serta (e) pembuatan laporan kepegawaian untuk kebutuhan perencanaan dan penilaian SPBE. Alur penggunaan SIMPEG dimulai dari input data oleh operator kepegawaian di masing-masing unit kerja, verifikasi oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, hingga aksesibilitas data oleh pimpinan dan bidang terkait untuk keperluan pengambilan keputusan. Sistem ini telah terintegrasi secara parsial dengan sistem kepegawaian nasional (BKN) dan menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi SPBE Kabupaten Madiun. Implementasi SIMPEG di Diskominfo

berlangsung dalam konteks tugas ganda: sebagai pengguna sistem sekaligus sebagai pengelola ekosistem digital daerah, yang menjadikan Diskominfo memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab yang lebih kompleks dalam keberhasilan sistem ini.

4.2 Implementasi SIMPEG: Dimensi *Support*

Dimensi *support* dalam implementasi SIMPEG di Diskominfo Kabupaten Madiun menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Secara kebijakan, SIMPEG ditetapkan sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola kepegawaian dan menjadi fondasi modernisasi administrasi ASN. Hasil observasi menunjukkan bahwa arahan SIMPEG sebagai instrumen strategis secara konsisten dikomunikasikan dalam rapat koordinasi internal. Bukti dokumentasi berupa Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah mengonfirmasi komitmen kelembagaan tersebut secara formal. Sekretaris Dinas (I2) menambahkan: "*Kami diarahkan untuk tidak sekedar mengisi data, tetapi memastikan data yang masuk bisa digunakan sebagai dasar kebijakan kepegawaian jangka menengah.*" Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (I4) menyatakan: "*Anggaran untuk pemeliharaan server dan keamanan TIK sudah masuk dalam perencanaan tahunan, meskipun besarnya masih menyesuaikan kapasitas fiskal daerah.*"

Komitmen pimpinan diwujudkan melalui penetapan kebijakan, koordinasi lintas bidang, dan penentuan arah pengembangan jangka menengah. Sebagaimana Kepala Dinas (I1) menyatakan: "*Pimpinan mendorong pemanfaatan SIMPEG sebagai basis pengambilan keputusan strategis, bukan sekedar sebagai repositori data*". Komitmen ini diperkuat dengan dorongan peningkatan keamanan informasi untuk melindungi data kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dukungan anggaran pun telah dialokasikan untuk pemeliharaan sistem, peningkatan server, dan penguatan keamanan TIK berdasarkan regulasi internal yaitu pada SOP penyusunan regulasi kebijakan keputusan, SOP pemeliharaan server, dan SOP pengujian keamanan informasi.

Terdapat konvergensi pandangan antara I1 dan I2 bahwa komitmen pimpinan terhadap SIMPEG sudah kuat secara kebijakan. Namun, I3 memberikan catatan yang lebih kritis: "*Arahan dari pimpinan sudah jelas, tetapi tidak selalu diikuti mekanisme evaluasi yang teratur di lapangan.*" Divergensi ini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan sudah hadir pada level strategis, tetapi belum sepenuhnya menetes ke level operasional secara konsisten.

4.3 Implementasi SIMPEG: Dimensi *Capacity*

Kesiapan sumber daya manusia secara operasional dinilai cukup memadai. Observasi langsung terhadap penggunaan SIMPEG menunjukkan bahwa operator mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar sistem dengan lancar, namun kesulitan muncul ketika diminta menghasilkan laporan analitik yang tidak tersedia dalam menu standar. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (I4) mengonfirmasi: "*Infrastruktur server sudah cukup untuk kondisi saat ini, tetapi kalau volume data ASN bertambah dan integrasi dengan sistem nasional diperluas, kita perlu upgrade kapasitas.*" Staf Sandiman (I5) menambahkan: "*Kadang ada gangguan jaringan yang membuat akses SIMPEG terhambat, terutama saat jam kerja padat.*" Bukti dokumentasi berupa laporan teknis internal tahun 2024 mencatat adanya gangguan sistem yang berdampak pada sebagian data kepegawaian, yang menurut pengakuan operator sulit ditangani tanpa bantuan teknis pengelola sistem, serta laporan evaluasi SPBE internal menunjukkan bahwa pelatihan SIMPEG terakhir dilakukan pada tahun 2025, sehingga pembaruan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan kompetensi teknis dan kemampuan analitik masih dibutuhkan agar SIMPEG dapat mendukung kebijakan berbasis data. Kepala Sub Bagian Umpeg (I3) menyatakan: "*SDM mampu mengoperasikan SIMPEG, tetapi masih memerlukan peningkatan kompetensi terutama dalam validasi dan pemutakhiran data*". Kebutuhan pelatihan berkala juga muncul sebagai kebutuhan mendesak, khususnya terkait keamanan data.

I4 dan I5 memiliki persepsi yang relatif selaras tentang keterbatasan infrastruktur, khususnya kapasitas server dan stabilitas jaringan. Perbedaan muncul pada penilaian kompetensi SDM: I3 menilai kemampuan operasional staf sudah memadai untuk tugas rutin, sementara I4 menekankan bahwa kemampuan analitik seperti mengolah data kepegawaian untuk keperluan perencanaan masih perlu ditingkatkan. Divergensi ini mencerminkan perbedaan perspektif antara pengguna harian dan pengelola sistem.

4.4 Implementasi SIMPEG: Dimensi *Value*

Implementasi SIMPEG terbukti memberikan nilai manfaat yang nyata bagi organisasi. Observasi terhadap proses administrasi kepegawaian menunjukkan bahwa pencarian data pegawai yang sebelumnya memerlukan waktu 15–30 menit melalui arsip fisik kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui SIMPEG. Kepala Dinas (I1) menyatakan: "*Ketika kami perlu data untuk pertimbangan mutasi atau promosi, SIMPEG menjadi rujukan pertama. Ini mengubah cara kami membuat keputusan.*" Sekretaris Dinas (I2) menambahkan: "*Integrasi data antar-bidang juga jauh lebih baik; dulu sering terjadi ketidakcocokan data antara bagian kepegawaian dengan bagian keuangan, sekarang sudah lebih konsisten.*" Bukti dokumentasi berupa laporan evaluasi SPBE Kabupaten Madiun tahun 2025 mencatat peningkatan skor domain Manajemen ASN, yang sejalan dengan semakin tertibnya pengoperasian SIMPEG.

Pada aspek efisiensi administrasi, peralihan dari dokumen fisik ke proses digital telah mempercepat pencatatan, pencarian data, dan penyusunan dokumen kepegawaian secara signifikan. Kepala Sub Bagian Umpeg (I3) mengungkapkan: "*Proses yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik kini dapat dilakukan secara digital sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif.*" Integrasi data ASN melalui SIMPEG menjadikan pengelolaan informasi pegawai lebih tertata, terpusat, dan mudah diakses, sekaligus mengurangi potensi duplikasi dan inkonsistensi data antar-unit kerja.

Seluruh informan sepakat bahwa SIMPEG membawa manfaat nyata dalam hal efisiensi administrasi. Namun, I1 dan I2 lebih menekankan nilai strategis (pengambilan keputusan berbasis data), sementara I3 dan I5 lebih merasakan manfaat pada level operasional (kecepatan pencarian data dan pengurangan dokumen fisik). Konvergensi pada manfaat efisiensi, dengan variasi pada level yang dirasakan, memperkuat temuan bahwa SIMPEG sedang bertransisi dari instrumen administratif menuju instrumen strategis.

Temuan implementasi SIMPEG berdasarkan kerangka *Support*, *Capacity*, dan *Value* diringkas pada Tabel 2. Penilaian status pada tabel tersebut didasarkan pada tiga kriteria berikut: "Baik" apabila indikator telah terpenuhi secara konsisten dan didukung oleh bukti kebijakan, observasi, serta pernyataan mayoritas informan tanpa hambatan signifikan; "Cukup" apabila indikator sebagian besar terpenuhi namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dalam jangka menengah; "Perlu Peningkatan" apabila indikator belum terpenuhi secara optimal dan menjadi hambatan nyata yang memerlukan intervensi segera.

Tabel 2: Ringkasan Temuan Implementasi SIMPEG Berdasarkan Kerangka *Support*, *Capacity*, dan *Value*

Dimensi	Indikator	Temuan Lapangan	Status
<i>Support</i>	Dukungan Pimpinan	Pimpinan mendorong SIMPEG sebagai basis pengambilan keputusan strategis dan komitmen memperkuat keamanan informasi.	Baik

	Ketersediaan Regulasi/ SOP	SOP Internal dan instruksi pimpinan telah tersedia; penguatan regulasi yang lebih komprehensif masih diperlukan.	Cukup
	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan untuk pemeliharaan, server, dan keamanan TIK; pengembangan lanjutan masih menyesuaikan kapasitas fiskal.	Cukup
	Komitmen Digitalisasi	SIMPEG menjadi komponen penting transformasi digital dan ditetapkan sebagai instrumen strategis tata kelola ASN	Cukup
Capacity	Kompetensi SDM SIMPEG	SDM mampu mengoperasikan sistem; peningkatan kompetensi teknis dan analitik data masih dibutuhkan.	Cukup
	Infrastruktur TIK	Infrastruktur relatif memadai; peningkatan kapasitas server dan interoperabilitas menjadi prioritas.	Cukup
	Ketersediaan Jaringan dan Perangkat	Jaringan tersedia namun masih terjadi kendala situasional yang mempengaruhi akses sistem.	Perlu Peningkatan
	Kapasitas Teknis Operasional	Sistem berjalan baik; pemantauan rutin dan pembaruan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah kerentanan keamanan.	Cukup
Value	Kemudahan Akses Data Kepegawaian	Data kepegawaian dapat diakses terpusat dan cepat oleh pihak berwenang dengan pengaturan hak akses.	Baik
	Efisiensi Administrasi Kepegawaian	Peralihan dari dokumen fisik ke digital mempercepat pencatatan dan penyusunan dokumen secara signifikan.	Baik
	Kecepatan Layanan Kepegawaian	Proses layanan kepegawaian (mutasi, promosi, evaluasi) lebih cepat dan mengurangi ketergantungan kerja manual.	Baik

Sumber: Data Primer, diolah (2026).

4.5 Kontribusi SIMPEG terhadap *E-Government*

Implementasi SIMPEG di Diskominfo Kabupaten Madiun memberikan kontribusi nyata terhadap penerapan *e-Government* dalam lima aspek. Pertama, digitalisasi layanan kepegawaian: SIMPEG mentransformasi proses administrasi ASN yang sebelumnya berbasis dokumen fisik menjadi layanan digital yang dapat diakses secara terpusat, mempercepat siklus layanan kepegawaian mulai dari pencatatan, pemrosesan mutasi, hingga pelaporan. Kedua, peningkatan efisiensi birokrasi: SIMPEG mengurangi beban kerja secara manual, mempercepat urusan administratif, dan meningkatkan produktivitas aparatur. Ketiga, penguatan integrasi dan kualitas data ASN: data kepegawaian menjadi lebih terintegrasi, konsisten, dan mendukung interoperabilitas sistem dalam arsitektur SPBE. Keempat, dukungan pengambilan keputusan berbasis data: SIMPEG menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar kebijakan strategis kepegawaian. Kelima, dukungan implementasi SPBE: SIMPEG menjadi aplikasi inti yang berkontribusi pada pemenuhan domain Manajemen ASN dalam penilaian SPBE.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Muin et al. (2024) dan Sariasih dan Wijaya (2025) yang sama-sama menunjukkan bahwa SIMPEG berkontribusi positif terhadap efisiensi administrasi kepegawaian dan penguatan *e-Government* pada instansi pemerintah masing-masing. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan dimensi nilai strategis SIMPEG dalam konteks instansi yang sekaligus berperan sebagai pengelola ekosistem digital daerah, yang

menghasilkan dinamika implementasi yang lebih kompleks dibandingkan instansi teknis pada umumnya.

4.6 Hambatan Implementasi dan Upaya Penguatan

Hambatan implementasi SIMPEG bersifat multidimensional dan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Hambatan struktural mencakup kebutuhan penguatan regulasi internal dan koordinasi lintas perangkat daerah, serta ketergantungan pengembangan sistem pada kemampuan anggaran. Dalam perspektif SCV, hambatan ini berada pada dimensi *Support*, mengindikasikan bahwa dukungan kelembagaan masih perlu diperkuat secara formal dan sistematis.

Hambatan teknis meliputi kapasitas server dan interoperabilitas sistem yang belum sepenuhnya optimal, kendala jaringan yang bersifat situasional, serta risiko keamanan siber terhadap data kepegawaian. Informan I4 menyatakan: "*Integrasi dengan sistem BKN nasional masih belum sempurna; ada beberapa field data yang tidak sinkron secara otomatis.*" Hambatan ini berada pada dimensi *Capacity* dan secara langsung mempengaruhi stabilitas nilai (*value*) yang dapat dihasilkan sistem. Dalam kerangka Edwards III, hambatan teknis ini mencerminkan keterbatasan sumber daya (*resources*) yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi.

Hambatan kultural berkaitan dengan keterbatasan kompetensi digital SDM, inkonsistensi pemutakhiran data di unit kerja, dan resistensi terhadap perubahan pola kerja, terutama di kalangan aparatur yang telah lama terbiasa dengan sistem manual. Hambatan ini berada di persimpangan dimensi *Capacity* dan *Support*, karena penyelesaiannya memerlukan kombinasi pelatihan (kapasitas) dan komitmen pimpinan yang konsisten (dukungan).

Ketiga kelompok hambatan ini saling berkaitan dan menuntut respons penguatan yang terkoordinasi dengan strategi penguatan yang sesuai untuk masing-masing kategori hambatan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3: Klasifikasi Hambatan Implementasi SIMPEG dan Upaya Penguatan

Kategori Hambatan	Hambatan Utama	Upaya Penguatan
Struktural	Regulasi internal belum komprehensif. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal; pengembangan sistem bergantung pada kemampuan anggaran.	Penyusunan regulasi internal yang terintegrasi; penguatan koordinasi lintas bidang; peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem.
Teknis	Kapasitas server dan interoperabilitas sistem belum optimal; kendala jaringan situasional; risiko keamanan siber terhadap data kepegawaian.	Peningkatan kapasitas server dan stabilitas jaringan; integrasi SIMPEG dengan sistem kepegawaian nasional; penguatan keamanan siber melalui firewall, enkripsi, dan pemantauan risiko berkala.
Kultural	Keterbatasan kompetensi digital SDM; inkonsistensi pemutakhiran data di unit kerja; resistensi terhadap perubahan pola kerja.	Pelatihan berkala tentang penggunaan sistem dan keamanan data; penyusunan SOP pemutakhiran data yang mengikat; pembangunan budaya kerja berbasis data (<i>data-driven culture</i>).

Sumber: *Data Primer, diolah (2026)*

Sejumlah strategi penguatan telah diidentifikasi, antara lain: pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan literasi digital aparatur; peningkatan kapasitas server,

stabilitas jaringan, dan integrasi SIMPEG dengan sistem kepegawaian nasional; penguatan sistem keamanan informasi melalui pengendalian akses dan pemantauan risiko siber; serta penguatan regulasi internal yang lebih komprehensif. Dalam jangka panjang, SIMPEG diproyeksikan berkembang sebagai instrumen manajemen talenta ASN yang mendukung agenda reformasi birokrasi tematik, dengan optimalisasi pemanfaatan data sebagai basis perencanaan organisasi.

5 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIMPEG di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah berjalan secara memadai dan berada dalam trajektori perkembangan yang positif menuju tata kelola kepegawaian berbasis digital. Berdasarkan kerangka SCV, dimensi *support* tergolong cukup kuat, ditopang oleh kebijakan strategis, komitmen pimpinan, regulasi internal, dan alokasi anggaran yang memadai. Dimensi *capacity* sudah berfungsi secara operasional, namun masih memerlukan penguatan pada kompetensi analitik SDM, stabilitas jaringan, dan interoperabilitas sistem. Dimensi *value* menunjukkan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi administrasi, integrasi data ASN yang lebih terpusat, dan tersedianya basis informasi untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Temuan menunjukkan bahwa SIMPEG tengah bergerak menuju peran yang lebih strategis sebagai komponen pendukung *data-driven governance* dalam kerangka SPBE, melampaui fungsi administratifnya yang semula. Hambatan implementasi bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, teknis, dan kultural. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup bertumpu pada kesiapan teknologi semata, melainkan menuntut kematangan organisasi secara menyeluruh yang mencakup tata kelola, kapasitas SDM, dan budaya kerja berbasis data.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penyelenggaraan pelatihan digital berkelanjutan bagi aparatur, peningkatan kapasitas infrastruktur TIK, penguatan regulasi internal yang komprehensif, serta optimalisasi SIMPEG sebagai basis data strategis kepegawaian. Untuk agenda riset ke depan, disarankan agar kajian serupa dilakukan secara komparatif pada beberapa perangkat daerah, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur efektivitas implementasi secara lebih terukur, serta menginvestigasi dampak integrasi sistem kepegawaian nasional terhadap kinerja organisasi daerah.

Daftar Pustaka

- Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>
- Ariadi, Badaruddin, & Saharuddin. (2025). Manajemen sumber daya manusia di era digital: Studi bibliometrik. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA*, 9(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6342>
- Astuti, T. D., Ramdani, E. M., Gedeona, H. T., & Maulana, R. R. (2025). Policy implementation of Rumah Dataku development for quality family village in Kiaracandong Sub-district, Bandung City, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i3.24308>
- Huda, M. N., Kurniasari, E. N., & Ruroh, S. M. (2022). A systematic literature review of e-Government evaluation. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 32–48.

- Kannapadang, D., Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing *e-Government* for enhanced transparency and accountability in local governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.2456>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
- Malik, A., Budhwar, P., Mohan, H., & Sharma, N. R. (2023). Employee experience – The missing link for engaging employees: Insights from an AI-based ecosystem. *Human Resource Management*, 62(1), 97–115.
- Maulana, A. N., Huda, M. S., Pratama, N. R., & Depina, A. (2025). Analisis sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web di BKD Provinsi Jambi menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(1), 284–288.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Muin, S., Muthalib, A., & Supriaddin. (2024). Analisis implementasi SIMPEG untuk mendukung *e-Government* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 437–452.
- Normajatun, N., Enggok, S., & Rahayu, I. (2022). Penerapan aplikasi SIMPEG berbasis *e-Government* dalam pengelolaan data informasi kepegawaian di Kota Banjarmasin. *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 14–23.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13.
- Nurhidayah, N. U., Setiyono, B., & Wijayanto. (2025). Pengembangan *e-Government* melalui situs web di Desa Bulakan Kabupaten Pemalang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 1–15.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. (2022). Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (2018). Sekretariat Kabinet.
- Putra, M. T., Indartini, M., & Rohmatiah, A. (2024). Pengaruh kepuasan kerja, komitmen, dan budaya organisasi terhadap organizational citizenship behaviour (OCB). *EKOMAKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(1).
- Sariasih, K. Y., & Wijaya, K. A. S. (2025). Penerapan SIMPEG dalam mendukung *e-Government* pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara.
- Wicaksono, T. A., Wulansari, A., & Rahmawati, R. (2025). Acceptance analysis and application success Bicarakan.id using UTAUT and DeLone & McLean. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 8(1), 307–316.